

ABSTRAK

Madura menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Destinasi wisata di Madura juga beragam, terdapat wisata alam, wisata religi, wisata sejarah dan wisata budaya. Potensi pariwisata yang besar ini dapat dijadikan sebagai dasar utama pembangunan pariwisata di Pulau Madura, upaya pembangunan pariwisata di Pulau Madura ini menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah di Pulau Madura untuk mengembangkan potensi daerah . Sebagai pendukung terlaksananya upaya pembangunan pariwisata di Pulau Madura , diperlukan kebijakan yang mengatur mengenai pariwisata secara eksplisit khususnya dalam sektor pembangunan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian normatif, dengan spesifikasi pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Historical. Metode dan teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Metode analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Pembentukan peraturan bupati bersama di Empat Kabupaten yang berada di wilayah Madura akan menciptakan payung hukum dengan dasar yang kuat sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penataan pembangunan pariwisata di Pulau Madura. Kepariwisataan di Pulau Madura akan memiliki regulasi yang jelas sehingga akan memudahkan pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya pembangunan pariwisata .

Kata Kunci : Pulau Madura, Pembangunan Pariwisata, Peraturan Bupati

ABSTRACT

Madura is an area that has a large tourism potential. Tourist destinations in Madura are also diverse, there are natural attractions, religious tourism, historical tourism and cultural tourism. This huge tourism potential can be used as the main basis for tourism development on Madura Island. Tourism development efforts on Madura Island is the first step for local governments on Madura Island to develop regional potential. As a supporter of the implementation of tourism development efforts on Madura Island, it is necessary to have policies that explicitly regulate tourism, especially in the development sector.

This research is a legal research with normative research methods, with the specification of the Law approach and Historical approach. Data collection methods and techniques use secondary legal materials and primary legal materials. Methods of data analysis using qualitative juridical methods.

The formation of regent regulations with Four Regencies in the Madura region will create a legal umbrella with a strong foundation so that it can be used as a reference in structuring tourism development on Madura Island. Tourism in Madura Island will have clear regulations so that it will facilitate local governments in carrying out tourism development efforts.

Keywords: Madura Island, Tourism Development, Formation of Regents Regulations